

**EKSISTENSI UTAMA WIDYALAYA / UTAMA WIDYALAYA  
KEJURUAN DI INDONESIA  
(IMPLIKASI TERHADAP ASPEK DINAMIKA, SOSIOLOGIS  
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN)**

**I Made Bagus Andi Purnomo<sup>1</sup>; I Nyoman Ariyoga<sup>2</sup>**

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan<sup>1,2</sup>

Email: [bagusandipurnomo@gmail.com](mailto:bagusandipurnomo@gmail.com)<sup>1</sup>; [nyomanariyoga92@gmail.com](mailto:nyomanariyoga92@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara landasan normatif penyelenggaraan Utama Widyalyaya/Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) di Indonesia dan kondisi faktual di lapangan. Secara regulatif, pemerintah telah menempatkan Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal yang berfungsi menjaga nilai agama sekaligus menyiapkan kompetensi lulusan sekolah umum dan kejuruan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan tata kelola, kapasitas sumber daya, serta penerimaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, FGD, serta kajian dokumen untuk menggali dinamika, aspek sosiologis, dan pengembangan kelembagaan UW/UWK. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek dinamika, keberlangsungan UW/UWK sangat dipengaruhi oleh respons terhadap perubahan kebijakan, tuntutan kompetensi, dan kesiapan manajerial lembaga. Dari aspek sosiologis, UW/UWK berperan penting dalam membentuk identitas agama-budaya, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi ruang mobilitas sosial bagi peserta didik. Resepsi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan lembaga. Sementara itu, dari aspek pengembangan kelembagaan, dukungan pemerintah melalui revisi PMA 2/2024, rencana penerangan Widyalyaya swasta, dan pendirian Widyalyaya baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, akses, serta daya saing pendidikan Hindu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi UW/UWK merupakan hasil interaksi antara regulasi, dukungan sosial, dan kapasitas kelembagaan. Penguatan tata kelola, relevansi kurikulum, dan kolaborasi dengan masyarakat diperlukan agar Widyalyaya mampu berkembang secara berkelanjutan dan adaptif.

**Kata kunci:** Utama Widyalyaya, pendidikan Hindu, dinamika kelembagaan, aspek sosiologis, pengembangan pendidikan

**ABSTRACT**

*This study is motivated by the persistent gap between the normative expectations of the Indonesian government regarding the role of Utama Widyalyaya/Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) and the realities encountered in its implementation. Although national regulations position Widyalyaya as formal institutions designed to preserve religious values while preparing students with relevant vocational competencies, practical challenges remain evident, particularly in governance, resource capacity, and community reception. This research employs a qualitative approach involving participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis to examine the dynamics, sociological implications, and institutional development of UW/UWK. Data were analyzed using stages of reduction, narrative presentation, and inductive conclusion. The findings reveal that institutionally, UW/UWK's sustainability is influenced by its responsiveness to policy changes, evolving competency demands, and internal managerial readiness. Sociologically, UW/UWK strengthens cultural-*

*religious identity, enhances social cohesion, and contributes to social mobility for Hindu students. Community reception emerges as a determining factor shaping institutional legitimacy and continuity. In terms of institutional development, government support—particularly through revisions of PMA 2/2024, the proposal to nationalize private Widyalyaya, and the establishment of new state-run Widyalyaya—constitutes strategic efforts to improve quality, expand access, and enhance the competitiveness of Hindu education. The study concludes that the existence of UWK results from the interplay between regulatory frameworks, social legitimacy, and institutional capacity. Strengthening governance systems, enhancing curriculum relevance, and fostering community collaboration are essential for ensuring the sustainable and adaptive development of Widyalyaya in Indonesia.*

**Keywords:** *Utama Widyalyaya, Hindu education, institutional dynamics, sociological implications, institutional development*

---

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui regulasi nasional menegaskan aspirasi normatif tentang peran dan fungsi Widyalyaya sebagai satuan pendidikan formal berciri khas agama Hindu yang tidak hanya menjaga nilai-nilai keagamaan tetapi juga menyiapkan kompetensi umum dan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini, lembaga pendidikan umum bercirikan agama (termasuk widyalyaya) berperan dalam melahirkan bukan hanya generasi terampil semata, tetapi juga memiliki adab dan akhlak mulia (Anshori, 2017; Pratama, 2019). Kebijakan terbaru (PMA) menempatkan Widyalyaya dalam kerangka jenjang dan pengelolaan yang baku sehingga diharapkan menjadi sarana penguatan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan bagi umat Hindu (Peraturan Menteri Agama, 2024; Peraturan Menteri Agama Nomor 56/2014 dan perubahannya).

Secara praktis, lembaga pendidikan agama dan keagamaan (widyalyaya) memiliki peran penting dalam memperkaya ekosistem pendidikan di Indonesia, terutama sebagai lembaga yang menekankan penguatan nilai-nilai agama, budaya, dan moral di tengah dinamika modernisasi (Purnomo, 2023; Sutriyanti, 2020; Yoga Segara, 2016). Sebagai institusi pendidikan keagamaan Hindu, widyalyaya tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan spiritual dan tradisi Hindu semata, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki identitas budaya yang kuat, etika sosial yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran strategis widyalyaya juga terlihat dalam kontribusinya mencetak generasi muda yang mampu menjadi penjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus agen perubahan sosial dalam komunitasnya. Selain itu, widyalyaya menjadi mitra penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan keagamaan yang berkualitas, merespons kebutuhan masyarakat, dan memperkuat keberagaman dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, eksistensi widyalyaya menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan manusia secara utuh melalui kolaborasi nilai, spiritualitas, dan pengetahuan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya jarak signifikan antara harapan kebijakan tersebut dan praktik penyelenggaraan. Banyak studi menyorot keterbatasan kapasitas tata kelola lembaga, kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur, lemahnya hubungan dengan dunia industri, serta dukungan masyarakat yang belum merata (Purnomo, 2022). Faktor-faktor yang menurunkan efektivitas Widyalyaya dalam memenuhi tujuan kejuruan dan sosial. Kesenjangan ini juga termanifestasi dalam data pokok pendidikan dan pengakuan formal lembaga, dimana beberapa Widyalyaya masih beroperasi dalam status transisi (dari pasraman ke Widyalyaya formal) sehingga menghadapi masalah legal-formal dan legitimasi administratif yang mempengaruhi pendanaan, akreditasi, dan akses peserta didik.

Secara sosiologis dan kelembagaan, gap antara *das sollen* dan *das sein* menimbulkan

implikasi ganda: (1) dinamika internal lembaga yang rentan terhadap friksi nilai, praktik manajerial yang belum profesional, dan ketergantungan pada modal sosial lokal; serta (2) konsekuensi eksternal berupa keterbatasan kontribusi Widyalyaya terhadap link-and-match kejuruan, mobilitas sosial lulusannya, dan legitimasi kelembagaan dalam ekosistem pendidikan nasional. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut dan merumuskan model penguatan kelembagaan Widyalyaya kejuruan yang kontekstual menghubungkan tuntutan normatif (kebijakan) dengan kondisi implementatif di lapangan agar Widyalyaya dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendidikan keagamaan sekaligus pusat pengembangan keterampilan kejuruan.

Pendidikan kejuruan memegang peranan krusial dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja. Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan seperti Utama Widyalyaya atau Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) muncul sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Eksistensi lembaga-lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengakui keberadaan lembaga pendidikan umum bercirikan agama, termasuk Widyalyaya sebagai bagian dari jalur pendidikan yang setara. Pengakuan hukum ini menjadi landasan bagi berkembangnya lembaga-lembaga seperti UW/UWK yang fokus pada praktik keterampilan spesifik untuk memasuki dunia kerja (Pratama, 2019).

Secara sosiologis, keberadaan UW/UWK merespons langsung kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada lapangan kerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Freire (2000) dalam pedagogi kritisnya, pendidikan harus membebaskan dan memampukan individu untuk mengubah realitas sosialnya. Dalam perspektif ini, UWK dapat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak mampu mengakses pendidikan formal atau membutuhkan keterampilan tambahan untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonominya. Lembaga ini berfungsi sebagai agent of change yang menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dengan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi tuntutan kompetensi spesifik di masyarakat (Sudjana, 2004).

Dari aspek pengembangan kelembagaan, keberlanjutan UWK sangat bergantung pada kemampuan adaptasinya terhadap perubahan zaman. Menurut teori kelembagaan baru, organisasi harus melakukan isomorfisme baik koersif, normatif, maupun mimetik untuk mendapatkan legitimasi dan bertahan hidup. Dalam konteks UWK, hal ini diterjemahkan ke dalam kebutuhan untuk menyesuaikan standar kompetensi dengan kebutuhan industri (*isomorfisme koersif/normatif*), mengadopsi praktik manajemen yang baik dari lembaga sejenis (*isomorfisme mimetik*), dan membangun jaringan kemitraan yang kuat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan juga memerlukan manajemen sumber daya, inovasi program, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas lulusannya tetap relevan.

Namun, eksistensi UWK juga dihadapkan pada berbagai tantangan dinamis, seperti persaingan dengan lembaga kursus sejenis, perubahan regulasi, dan percepatan teknologi yang menggeser permintaan keterampilan. Studi yang dilakukan oleh (Marzuki, 2021) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan nonformal harus mampu berinovasi dalam model pembelajarannya dan memperkuat branding untuk tetap kompetitif. Dinamika eksternal ini menuntut UWK untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis-pedagogis, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan strategi pemasaran agar dapat bertahan dan berkembang di tengah lingkungan yang berubah dengan cepat. Secara keseluruhan, eksistensi Utama Widyalyaya/Utama Widyalyaya Kejuruan merupakan hasil interaksi kompleks antara landasan hukum, fungsi sosiologis pemberdayaan, dan strategi pengembangan kelembagaan yang adaptif. Keberadaannya signifikan dalam

menjawab tantangan ketenagakerjaan dan pemerataan pendidikan, meskipun harus terus berbenah dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal yang terus berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif eksistensi Utama Widyalyaya/Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) di Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama. *Pertama*, dari aspek dinamika, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor pendorong dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan operasional UW/UWK, termasuk respons mereka terhadap perubahan kebijakan, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar kerja. *Kedua*, dari aspek sosiologis, tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peran dan fungsi sosial UWK dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat, mobilitas sosial ekonomi peserta didik, serta relevansinya dalam menjawab kebutuhan keterampilan dan menjembatani kesenjangan dengan dunia industri di tingkat lokal dan nasional. *Ketiga*, dari aspek pengembangan kelembagaan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan model pengembangan kelembagaan yang diterapkan oleh UWK untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitasnya, yang mencakup aspek tata kelola, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pembangunan jaringan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta inovasi dalam model pembelajaran dan manajemen. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan sebuah gambaran holistik dan mendalam tentang posisi strategis UW/UWK dalam sistem pendidikan nasional serta merumuskan implikasi praktis yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pengelola lembaga dalam memperkuat peran UW/UWK di masa depan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, serta data sekunder dari dokumen dan arsip terkait. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang melibatkan pihak Kanwil, pengelola yayasan, kepala widyalyaya, guru, dan siswa. Instrumen penelitian terdiri atas peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar analisis dokumen. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai keberlanjutan tata kelola widyalyaya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif maupun tabel, serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk menggali pola, makna, dan hubungan yang muncul dari temuan lapangan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Implikasi Terhadap Dinamika Pendidikan Hindu

Utama Widyalyaya di Bali memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika pendidikan, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan Hindu setingkat SMA/SMK, keberadaan Widyalyaya menjadi simbol bahwa pendidikan Hindu tidak hanya berhenti di tingkat dasar, melainkan mampu mengantarkan peserta didik menuju jenjang pendidikan tinggi dengan bekal akademik, spiritual, dan kultural. Dalam perspektif teori manajemen resepsi dalam pendidikan, Eksistensi lembaga pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat sebagai penerima (receiver) merespons mutu, relevansi, dan eksistensi lembaga tersebut. Artinya, apabila Widyalyaya dinilai mampu memberikan kualitas pembelajaran yang baik, penguatan karakter, serta prospek masa depan bagi siswa, maka masyarakat akan memberi dukungan, baik berupa kepercayaan, partisipasi, maupun kontribusi nyata dalam pengembangan sekolah.

Menurut Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu, Ketut Sudarsana bahwa Eksistensi Widyalyaya menjadi kunci agar umat Hindu memiliki akses pendidikan yang setara dengan lembaga umum:

“Eksistensi Utama Widyalyaya itu bukan hanya urusan internal sekolah, tetapi bagian dari dinamika pendidikan nasional. Kalau lembaga ini kuat, maka generasi Hindu memiliki pilihan pendidikan yang bermutu tanpa harus meninggalkan identitas agamanya” (wawancara, 5 Agustus 2025).

Senada dengan itu, Kasubdit Pendidikan Menengah Ditjen Bimas Hindu, Raditya, menekankan bahwa Eksistensi Widyalyaya berhubungan langsung dengan penerimaan masyarakat:

“Dalam manajemen resepsi pendidikan, persepsi masyarakat sangat menentukan. Jika masyarakat melihat bahwa lulusan Widyalyaya mampu bersaing masuk perguruan tinggi dan dunia kerja, maka Eksistensi lembaga akan terjamin. Sebaliknya, jika dinilai tidak relevan, masyarakat akan berpindah ke sekolah lain” (wawancara, 7 Agustus 2025).

Dari sisi masyarakat, I Ketut Pasek, tokoh adat di Buleleng, mengungkapkan bahwa dukungan akan diberikan selama lembaga memberi manfaat:

“Kami di desa adat akan mendukung Widyalyaya kalau benar-benar dirasakan manfaatnya untuk anak-anak kami. Kalau lulusan bisa pintar, punya budi pekerti, dan dapat pekerjaan, tentu masyarakat akan terus menitipkan anak-anaknya ke sana” (wawancara, 12 Agustus 2025).

Paparan tersebut menunjukkan bahwa implikasi eksistensi Utama Widyalyaya di Bali erat kaitannya dengan dinamika resepsi masyarakat terhadap kualitas dan relevansi pendidikan yang ditawarkan. Widyalyaya yang mampu menjaga standar mutu pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai Hindu, dan menghasilkan lulusan kompetitif akan mendapat legitimasi sosial, sehingga memperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, apabila kelembagaan tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, Eksistensi Widyalyaya akan menghadapi tantangan serius.

Wawancara terbaru dengan Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sangat berkomitmen dalam mengembangkan widyalyaya kedepan. Dibuktikan dengan proses revisi PMA 2/2024 yang telah dilaksanakan pada 14 November 2025 di UNHI Denpasar.

...saat ini kami melaksanakan uji publik menyerap aspirasi mengenai revisi PMA 2/2025. Salah satu point penting adalah mengenai penegerian widyalyaya swasta dan pendirian widyalyaya baru oleh pemerintah (wawancara pada 14 November 2025).



Gambar 3.1 Dokumentasi pelaksanaan Uji Publik Rancangan Perubahan PMA 2/2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya di Indonesia  
Sumber Foto: IMBA Purnomo (2025)

Dokumentasi kegiatan di atas menguatkan pemahaman bahwa Pernyataan Dirjen Bimas Hindu mengenai komitmen pemerintah dalam mengembangkan widyalaya melalui revisi PMA 2/2024 (dan proses uji publik revisi PMA 2/2025) dapat dianalisis melalui berbagai teori dan pustaka mengenai pengembangan pendidikan. Dalam perspektif teori pembangunan pendidikan, kebijakan negara memegang peran sentral sebagai *enabling factor* yang menentukan arah, kualitas, dan Eksistensi sistem pendidikan. Menurut (Haddad, W. D., & Demsky, 1995), reformasi regulasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperkuat struktur tata kelola dan meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan. Revisi regulasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan kerangka hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan aktual widyalaya, terutama terkait status kelembagaan, kewenangan, serta pendirian lembaga baru.

Dalam teori tata kelola pendidikan (*educational governance*), sebagaimana dijelaskan oleh (Bush, 2003), penguatan peran pemerintah melalui kebijakan strategis diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan berjalan sesuai standar dan dapat memberikan layanan secara adil. Gagasan mengenai penegerian widyalaya swasta, sebagaimana disampaikan Dirjen, merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan memperluas akses, meningkatkan legitimasi, dan menjamin Eksistensi pembinaan pendidikan Hindu. Kebijakan ini sejalan dengan teori pemerataan pendidikan (*equity in education*) yang menekankan bahwa negara harus mengambil langkah afirmatif untuk mencegah kesenjangan layanan pendidikan, terutama pada lembaga keagamaan yang rentan menghadapi tantangan status hukum, pendanaan, dan sumber daya manusia.

Selain itu, melalui pendekatan teori pengembangan institusi pendidikan (Fullan, 2007), perubahan regulasi dan pembentukan institusi baru dipahami sebagai proses transformasi sistemik yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara, dan masyarakat. Revisi PMA melalui uji publik menunjukkan adanya mekanisme *participatory governance* yang membuka ruang dialog antara pemangku kepentingan. Model partisipatif ini penting karena pengembangan lembaga pendidikan tidak bisa mengandalkan pendekatan *top-down* semata; perubahan yang berhasil selalu melibatkan pihak yang terdampak langsung. Dengan demikian, proses uji publik mencerminkan prinsip *ownership* dan *shared responsibility* dalam perubahan pendidikan.

Dari sudut pandang teori kebijakan pendidikan, kegiatan revisi PMA dapat dipahami sebagai upaya *policy learning* dan *policy adaptation*. Menurut (Weimer, D. L., & Vining, 2017) kebijakan pendidikan harus terus dievaluasi agar responsif terhadap dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan kelembagaan. Keinginan pemerintah untuk menyerap aspirasi dan melakukan koreksi regulatif menandakan bahwa pengembangan widyalaya berada pada jalur kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), terutama karena persoalan status formal, pendanaan, dan pengorganisasian lembaga sebelumnya telah menimbulkan berbagai kendala di lapangan. Secara keseluruhan, kutipan wawancara tersebut sejalan dengan teori dan pustaka yang menekankan bahwa penguatan regulasi, peran aktif negara, partisipasi pemangku kepentingan, dan transformasi sistemik merupakan fondasi penting dalam pengembangan pendidikan. Langkah pemerintah dalam merevisi PMA serta mempertimbangkan penegerian widyalaya swasta mencerminkan proses konstruktif untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan legitimasi, dan memastikan Eksistensi lembaga pendidikan Hindu di Indonesia.

### 3.2 Implikasi Sosiologis

Implikasi Eksistensi Utama Widyalaya di Bali terhadap aspek sosiologis sangat penting karena lembaga pendidikan ini berperan dalam membentuk identitas, solidaritas, dan mobilitas sosial umat Hindu. Dalam perspektif teori manajemen resepsi dalam pendidikan, Eksistensi Widyalaya dipengaruhi oleh cara masyarakat menerima dan menilai manfaat sosial dari keberadaan sekolah tersebut. Apabila resepsi masyarakat positif karena melihat Widyalaya

mampu melahirkan generasi berkarakter, religius, dan kompetitif maka akan terbentuk dukungan kolektif yang memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kelembagaan. Sebaliknya, jika resepsi masyarakat negatif, misalnya menilai sekolah kurang bermutu atau tidak memberikan manfaat nyata, maka kepercayaan sosial akan menurun sehingga Eksistensi Widyalyaya terancam.

Menurut Ketut Pasek Gunawan, akademisi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Eksistensi Widyalyaya memiliki fungsi sosiologis untuk memperkuat kohesi umat Hindu di tengah arus modernisasi:

“Kalau sekolah Hindu seperti Widyalyaya ini mampu bertahan, maka secara sosiologis ia menjadi pusat integrasi umat. Anak-anak belajar bukan hanya pengetahuan, tetapi juga nilai kebersamaan yang akan menjaga identitas Hindu di Bali” (wawancara, 10 Agustus 2025).

Dari sisi praktisi pendidikan, Ni Luh Sulastris, guru Widyalyaya Astika Dharma, menekankan bahwa Eksistensi sekolah juga menciptakan rasa percaya diri sosial bagi siswa:

“Kami melihat anak-anak yang bersekolah di Widyalyaya merasa bangga bisa tetap belajar dengan dasar Hindu. Itu memberikan efek sosiologis bahwa mereka tidak minder di tengah dominasi sekolah umum, justru merasa punya identitas sendiri” (wawancara, 12 Agustus 2025).

Sementara itu, Ngakan Putra, perwakilan masyarakat sekaligus orang tua siswa di Buleleng, menegaskan pentingnya manfaat sosial langsung dari keberadaan Widyalyaya:

“Kalau sekolah ini bisa membantu anak-anak kami tumbuh dengan moral baik, disiplin, dan mampu melanjutkan studi, maka kami di masyarakat akan terus mendukung. Eksistensi sekolah berarti Eksistensi masa depan generasi kami” (wawancara, 14 Agustus 2025).

Dengan demikian, implikasi Eksistensi Utama Widyalyaya terhadap aspek sosiologis sangat erat dengan penerimaan masyarakat yang melihat sekolah sebagai wahana reproduksi nilai budaya, agama, dan sosial. Berdasarkan teori manajemen resepsi, Eksistensi hanya dapat terjamin jika Widyalyaya mampu menjaga persepsi positif masyarakat melalui kualitas pendidikan, manfaat sosial, dan relevansi dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan Widyalyaya tidak hanya berpengaruh pada dimensi pendidikan formal, tetapi juga pada penguatan struktur sosial umat Hindu di Bali.

Perspektif sosiologi pendidikan terhadap data di atas menunjukkan bahwa Eksistensi Widyalyaya bukan sekadar isu kelembagaan, melainkan bagian dari dinamika reproduksi sosial, identitas kolektif, dan integrasi budaya umat Hindu. Pandangan Ketut Pasek Gunawan menegaskan bahwa Widyalyaya memiliki fungsi laten sebagai pusat kohesi sosial. Dalam kerangka Durkheimian, lembaga pendidikan berperan sebagai *moral community* yang membentuk solidaritas melalui internalisasi nilai-nilai bersama. Eksistensi Widyalyaya menjadi mekanisme penting dalam menjaga *collective consciousness* umat Hindu, terutama di tengah tekanan diferensiasi sosial dan globalisasi budaya. Dengan mempertahankan ruang pendidikan berbasis nilai agama dan tradisi, Widyalyaya turut menahan erosi identitas komunal yang dapat terjadi akibat modernisasi yang serba individualistik.

Sementara itu, pandangan Ni Luh Sulastris menunjukkan dimensi sosiologis yang terkait dengan pembentukan identitas diri dan posisi sosial siswa. Hal ini selaras dengan konsep *self-concept* dan *social identity theory*, di mana lembaga pendidikan membentuk cara individu memandang dirinya dalam struktur sosial. Keberadaan Widyalyaya memberi siswa dasar identitas religius dan budaya yang membuat mereka tidak mengalami inferioritas di tengah dominasi sekolah-sekolah umum. Situasi ini mencerminkan proses *cultural empowerment*, yaitu ketika pendidikan berbasis kultur memberikan legitimasi simbolik kepada peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari komunitas yang bernilai dan bermartabat. Dengan demikian, Eksistensi Widyalyaya berkontribusi pada pembentukan identitas sosial yang kuat dan positif.

Pernyataan Ngakan Putra mencerminkan fungsi pendidikan sebagai wahana mobilitas sosial dan kontrol sosial. Dalam sosiologi pendidikan, sekolah tidak hanya mewariskan nilai, tetapi juga menyediakan struktur peluang sosial melalui pembelajaran, kedisiplinan, dan prestasi. Ketika masyarakat melihat manfaat langsung dari Widyalyaya, baik dari segi moral, kedisiplinan, maupun keberhasilan pendidikan anak, maka terbentuklah *community support system* yang memperkuat Eksistensi lembaga. Hal ini sesuai dengan teori Coleman tentang pentingnya *social capital* dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Dukungan masyarakat merupakan modal sosial yang menentukan Eksistensi institusi, karena memengaruhi kepercayaan, partisipasi, dan legitimasi sosial lembaga.

Secara keseluruhan, jika dikaitkan dengan upaya Ditjen bimas hindu melakukan proses penerangan dan pendirian widyalaya baru. Maka, dapat dimaknai bahwa eksistensi Utama Widyalyaya dapat dipahami melalui interaksi tiga dimensi sosiologis: kohesi sosial, identitas sosial, dan modal sosial masyarakat. Dalam perspektif teori reproduksi budaya Bourdieu, Widyalyaya berfungsi sebagai arena reproduksi nilai budaya Hindu yang menjadi basis identitas kolektif masyarakat Bali. Sementara itu, melalui perspektif manajemen resepsi, Eksistensi lembaga sangat ditentukan oleh cara masyarakat menilai relevansi dan manfaat sosial Widyalyaya. Semakin positif persepsi masyarakat, semakin kuat legitimasi dan dukungan terhadap keberlangsungan lembaga. Dengan demikian, Widyalyaya tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga menjadi pilar sosial yang memelihara kesinambungan budaya, memperkuat identitas anak didik, dan memperkokoh struktur sosial umat Hindu di Bali. Pembangunan widyalaya baru oleh pemerintah dan rencana penerangan widyalaya swasta dapat dibaca melalui perspektif teori reproduksi budaya Pierre Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan arena strategis untuk mereproduksi *cultural capital* (modal budaya), *habitus*, dan *field* (ranah sosial) suatu kelompok sosial. Dalam konteks ini, pendirian widyalaya baru oleh negara merupakan bentuk penguatan *institutionalized cultural capital* bagi umat Hindu, karena pemerintah menyediakan ruang pendidikan formal yang secara sistemik menjaga, mentransmisikan, dan melegitimasi nilai-nilai agama dan budaya Hindu. Ketika widyalaya dinaikkan statusnya menjadi sekolah negeri, legitimasi tersebut semakin kuat karena modal budaya Hindu memperoleh dukungan struktural dari negara, bukan semata-mata melalui usaha komunitas.

Wawancara dengan Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija (14 November 2025): “...Penerangan widyalaya swasta menjadi prioritas karena kami ingin memastikan bahwa pendidikan Hindu tidak hanya bertahan sebagai lembaga Hindu semata, tetapi juga mendapat legitimasi penuh dari negara. Ketika widyalaya menjadi negeri, maka nilai-nilai Hindu yang diajarkan di dalamnya memiliki kekuatan yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional.” Melalui kebijakan penerangan, widyalaya tidak hanya bertahan sebagai lembaga berbasis komunitas, tetapi juga masuk dalam struktur formal yang memiliki daya legitimasi tinggi dalam *field* pendidikan nasional. Dalam terminologi Bourdieu, negara melalui sistem pendidikan berperan sebagai agen reproduksi simbolik yang mengonversi modal budaya umat Hindu menjadi modal institusional. Hal ini memperluas akses, memperkuat posisi tawar lembaga Hindu dalam arena pendidikan, dan menegaskan bahwa budaya Hindu memiliki tempat yang sah dalam struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya administratif, tetapi simbolik, karena menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk mempertahankan dan mentransmisikan budaya.

Dari sisi *habitus*, pendirian widyalaya baru memungkinkan terbentuknya *habitus* religius-budaya yang konsisten pada generasi muda Hindu. Sekolah tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tetapi juga membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan sebagai umat Hindu di tengah perubahan zaman. Semakin kuat institusinya—terutama setelah dinegerikan—semakin besar kekuatan reproduksi *habitus* tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat

reproduksi sosial, yaitu Eksistensi komunitas Hindu Bali dalam menghadapi tekanan modernisasi dan homogenisasi budaya.

### 3.3 Implikasi Pengembangan Kelembagaan

Implikasi eksistensi Utama Widyalyaya di Bali terhadap aspek pengembangan kedepan sangat menentukan arah masa depan pendidikan Hindu, baik dari segi kelembagaan, mutu, maupun daya saing. Dalam perspektif teori manajemen resepsi dalam pendidikan, Eksistensi lembaga tidak hanya bergantung pada manajemen internal, tetapi juga pada sejauh mana penerimaan masyarakat (resepsi) melihat keberadaan Widyalyaya relevan dengan kebutuhan zaman. Jika masyarakat menilai Widyalyaya mampu melahirkan generasi yang berkarakter Hindu, unggul dalam akademik, dan siap menghadapi dunia kerja, maka legitimasi sosial semakin kuat dan membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut, baik berupa peningkatan fasilitas, diversifikasi program kejuruan, maupun integrasi teknologi digital. Sebaliknya, jika resepsi masyarakat negatif, maka pengembangan Widyalyaya akan berjalan lamban karena kurangnya dukungan partisipatif.

Menurut Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu, Ketut Sudarsana, Eksistensi Widyalyaya menjadi pijakan utama pengembangan kelembagaan:

“Kalau Widyalyaya bisa bertahan dan mendapat kepercayaan masyarakat, maka kedepan akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memperkuat dukungan, baik berupa anggaran maupun regulasi. Eksistensi itu modal awal untuk inovasi dan pengembangan” (wawancara, 14 November 2025).

Dari sisi pelaksana pendidikan, Ketut Suwena, guru Widyalyaya Astika Dharma, menekankan bahwa pengembangan harus berangkat dari pengalaman eksistensi:

“Kami belajar bahwa bertahan itu penting, tapi kedepan yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan mutu. Dengan Eksistensi, kami punya kesempatan untuk menambah program ekstrakurikuler, meningkatkan kapasitas guru, dan memperkuat pembelajaran berbasis teknologi” (wawancara, 12 Agustus 2025).

Sementara itu, Putu Mardika, tokoh dan pengamat widyalyaya menyoroti eksistensi Widyalyaya sebagai dasar legitimasi sosial bagi pengembangan lembaga Hindu:

“Jika masyarakat melihat Widyalyaya tetap eksis, maka masyarakat juga lebih mudah memberikan dukungan moral dan sosial. Eksistensi ini membuktikan bahwa lembaga Hindu mampu menjawab tantangan, sehingga pengembangan ke depan tidak hanya realistis, tapi juga mendapat legitimasi umat” (wawancara, 14 Agustus 2025).

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa Eksistensi UW/UWK tidak hanya menjaga kelangsungan lembaga saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan di masa depan. Dengan dukungan masyarakat yang positif sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen resepsi, Widyalyaya berpotensi memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas, serta memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan Hindu yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Titik serius pengembangan berkelanjutan widyalyaya adalah upaya Ditjen Bimas Hindu dalam menghadirkan widyalyaya yang lebih kompetitif dengan berupaya mendirikan widyalyaya baru oleh pemerintah dan penerangan widyalyaya swasta. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebagian besar widyalyaya terutama jenjang menengah masih dikelola yayasan yang tidak memiliki finansial yang mapan.

Upaya Ditjen Bimas Hindu dalam mengembangkan Widyalyaya melalui revisi PMA 2/2024 khususnya dengan menambahkan ketentuan tentang penerangan widyalyaya swasta dan pendirian widyalyaya baru oleh pemerintah mencerminkan langkah strategis dalam kerangka teori pengembangan pendidikan. Dalam perspektif teori ini, sebagaimana dijelaskan oleh Fullan, Gamage, dan Haddad, pengembangan pendidikan membutuhkan perubahan terencana yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan tata kelola agar sistem pendidikan mampu merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial. Revisi regulasi menjadi instrumen untuk

menata ulang struktur pendidikan Hindu agar lebih adaptif, inklusif, dan memiliki daya jangkauan yang lebih luas. Penegerian widyalaya swasta memperkuat legitimasi lembaga, meningkatkan kualitas melalui dukungan sumber daya negara, serta memastikan Eksistensi penyelenggaraan pendidikan agama Hindu secara formal. Sementara itu, pendirian widyalaya baru oleh pemerintah merupakan bentuk ekspansi sistemik yang bertujuan memperluas akses bagi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini kekurangan layanan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, revisi PMA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses transformasi pendidikan yang bertujuan memperkuat struktur institusional, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa widyalaya mampu memenuhi kebutuhan generasi Hindu di tengah perubahan zaman. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pengembangan lembaga pendidikan bukan sekadar membangun fisik atau menambah jumlah sekolah, tetapi menciptakan sistem yang berkelanjutan, berkualitas, dan selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang.

#### IV. SIMPULAN

Eksistensi Utama Widyalyaya di Indonesia memberikan implikasi yang luas terhadap dinamika pendidikan Hindu, aspek sosiologis, dan arah pengembangan kelembagaan kedepan. Dari sisi pendidikan, keberadaan Widyalyaya menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Hindu mampu berperan setara dengan lembaga umum melalui penyediaan layanan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada penguatan karakter serta identitas keagamaan. Resepsi masyarakat menjadi faktor penentu keberlanjutan lembaga, semakin positif persepsi terhadap kualitas lulusan dan manfaat pendidikan, semakin kuat legitimasi dan dukungan sosial yang diterima. Secara sosiologis, Widyalyaya berfungsi sebagai pusat kohesi, pembentuk identitas religius-budaya, sekaligus wadah mobilitas sosial umat Hindu. Dukungan masyarakat, tokoh adat, pendidik, dan lembaga keagamaan menunjukkan bahwa Widyalyaya tidak hanya mencetak siswa berpengetahuan, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai dan struktur sosial Hindu di tengah arus modernisasi. Di sisi kelembagaan, perkembangan Widyalyaya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya melalui revisi PMA 2/2024 dan rencana penegerian serta pendirian Widyalyaya baru. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara memperkuat tata kelola, memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keberlangsungan pendidikan Hindu dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Secara keseluruhan, Widyalyaya berperan sebagai institusi pendidikan, agen reproduksi budaya, dan pilar sosial umat Hindu, sementara kebijakan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa lembaga ini berkembang secara berkelanjutan, adaptif, dan relevan bagi generasi mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 63–74. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1243>
- Bush, T. (2003). *Theories of Educational Leadership and Management*. Sage Publications.
- Fullan, M. (2007). Change the terms for teacher learning. *Journal The Learning Professional*, 28(3), 35.
- Haddad, W. D., & Demsky, T. (1995). *Education policy-planning process: an applied framework*.
- Marzuki, M. (2021). Upaya Peningkatan Komitmen Kerja Guru Bidang Studi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 60–66. <https://doi.org/10.21009/jmp.v12i2.11109>
- Pratama, Y. A. (2019). Integrasi Pendidikan Madrasah pada Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1).
- Purnomo, I. M. B. A. (2022). *Upaya Publikasi Widya Pasraman Melalui Website www.infopasraman.com dalam Membangun Citra Positif*. [www.infopasraman.com](http://www.infopasraman.com)

- Purnomo, I. M. B. A. (2023). Perjuangan Pasraman Formal agar tetap Eksis sebagai Lembaga Pendidikan di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 13(01), 274–292. <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i01.p13>
- Sutriyanti, N. K. (2020). Persepsi Masyarakat Hindu Terhadap Keberadaan Pasraman Formal Di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 235. <https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i01.p11>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice*. Routledge.
- Yoga Segara. (2016). *PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEBUTUHAN PASRAMAN FORMAL Oleh: I NYOMAN YOGA SEGARA*. 247–258.